



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Juli 2019/Periodik - 2018)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN  
**SUB UNIT KERJA** : WAKIL KEPALA LEMBAGA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : BAYU ANDRIYANTO
2. Jabatan : WAKIL BUPATI
3. NHK : 208082

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 10.090.610.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 179 m<sup>2</sup>/145 m<sup>2</sup> di KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
2. Tanah Seluas 1000 m<sup>2</sup> di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 90.610.000
3. Tanah Seluas 111 m<sup>2</sup> di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah Seluas 109 m<sup>2</sup> di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah Seluas 749 m<sup>2</sup> di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
6. Tanah Seluas 757 m<sup>2</sup> di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
7. Tanah Seluas 701 m<sup>2</sup> di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 147.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	9.356.368
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	10.246.966.368
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.246.966.368

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **4 September 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.